

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A.W. Widjaja., *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Adisubrata, Winarna Surya, *Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu, 2003)

Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2015)

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019)

Bagir, Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004)

Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, (LP3ES, Jakarta)

C.S.T Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011)

Hiariej, E. O., *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012)

HR, Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Medan: Bitra Indonesia, 2013)

- Mansyur, Achmad., *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018)
- Mardzuki, P. M., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012)
- Moh. Mahfud MD, S. Marbun, *Wewenang Dalam Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Airlangga, 2009)
- Rahman, Meutiah Ganie., *Good Governance, Prinsip, Komponen, dan Penerapannya dalam Hak Asasi Manusia (Penyelenggaraan Negara Yang Baik*, (Jakarta: Penerbit Komnas HAM, 2000)
- S. F. Marbun, Moh. Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2006)
- S.H., Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2011)
- Sirajudin, Didik Sukriono dan Winardi., *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, (Malang: Setara Press, 2012)
- Solichin Abdul Wahab, *Masa Depan Otonomi Daerah (Kaian Sosial Ekonomi, Politik, untuk Menciptakan Sinergi Dalam Pembangunan Daerah)*, (Surabaya: Penerbit SIC, 2002)
- Sujarweni, V. W., *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Supriatna T. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum, (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Press, 2018)

The, Lian, Gie, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*,
(Jakarta: Gunung Agung, 1990)

Philipus Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jogyakarta,
Gadjahmada Press, 2015)

Prajudi Admosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
2016)

Wasistiono, Sadu., *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*
(Bandung: Fokus Media, 2008)

Widjaja HAW, *Otonomi Desa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Makalah & Jurnal

Astuti, “*Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa, Menyongsong Berlakunya
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014”, Universitas Budi Surakarta. Jurnal Riset
Akuntansi, 2016

Esmi Warasih, *Kegunaan Telaah Kebijakan Publik Terhadap Peranan Hukum Di
dalam Masyarakat Dewasa Ini*, Masalah-Masalah Hukum No II, FH UNDIP,
Semarang, 1994

Faisal Abdullah, “Implementasi Prinsip Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah”, Dalam Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Volume 13
No. 2 Juni 2005.

Kadek Wibawa, “*Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai
Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*”, Administrative

Law and Governance Journal, Vol. 2 No. 2, Juni 2019

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Birokrasi*, Makalah Dalam Diskusi Panel Dies Natalis

Fakultas Hukum Undip ke 32, Semarang, 1988

Marcus Lukman, *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan*

Pelaksanaan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi

Hukum Tertulis Nasional, (Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 1996)

Website

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021> (diakses pada 02 Juni 2023)

United Development Programme (UNDP)

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Wawancara

Kepala Desa Kalijambe, Bapak Suyitno

Kepala Seksi Pemerintahan Pemerintah Desa Kalijambe, Bapak Darso

Kepala Seksi Pelayanan Pemerintah Desa Kalijambe, Ibu Fatimah